

APBD

2023

PB NO. 46, BD NO.46/2023: 6 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG

- ABSTRAK :
- Untuk lebih mengefektifkan proses penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang pedoman penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.13 Thn 1950; UU No.23 Thn 2014; PERMENDAGRI No.71 Thn 2010; PP No. 12 Thn 2019; PERMENDAGRI No.64 Thn 2013; PERMENDAGRI No.77 Thn 2020; PERBUP No.50 Thn 2021.
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Bendahara Pengeluaran melakukan penerbitan dan pengajuan SPP-UP kepada PA melalui PPK-SKPD dalam pengisian UP, Pengajuan dan penerbitan SPP-GU dilaksanakan apabila UP telah digunakan paling sedikit 50%, perintah pencairan dana dibuat oleh kuasa BUD untuk mengeluarkan sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM-UP/GU/TU/LS yang diterima dari penggunaan anggaran/kuasa pengguna anggaran, kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D-LS mencakup: formulir penelitian kelengkapan dokumen SPM-LS(dicetak dengan kertas kuning), SPM-LS, surat pengantar SPM-LS, surta pernyataan tanggung jawab mutlak PA, surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD, cek list, lampiran SPM-LS, kelengkapan dokumen SPM-LS gaji untuk penerbitan SP2D-LS gaji mencakup: formulir penelitian kelengkapan dokumen SPM-LS (dicetak dengan kertas warna kuning), SPM-LS gaji, surat pengantar SPM-LS gaji, surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA, surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD, lampiran SPM-LS gaji, dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud dinyatakan tidak lengkap dan/tidak sah/pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2023 dan ditetapkan 29 Desember 2023;
 - Perubahan terkait yaitu Peraturan Bupati No.50 Tahun 2021 tentang pedoman penatausahaan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dinyatakan masih berlaku
 - Jumlah Halaman : 6 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : 1 Lampiran.